

Judul : DPR Bisanya Bikin Kecewa
Tanggal : Selasa, 31 Januari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

Buruh Migran Dipandang Hina

DPR Bisanya Bikin Kecewa

Cuitan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di akun Twitternya yang berbunyi, 'Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela', menambahkan kekecewaan kalangan buruh migran terhadap lembaga wakil rakyat tersebut.

TINDAKAN tersebut terjadi karena belum tuntasnya revisi UU Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri (PPTKILN). Kondisi ini menunjukkan rendahnya perhatian DPR kepada buruh migran.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (Seknas JBM), Savitri Wisnuwardhani mengatakan, pernyataan Fahri Hamzah menjadi salah satu cerminan bagaimana para pembuat undang-undang masih memandang rendah para pekerja migran. Terutama pekerja rumah tangga, yang saat ini mendominasi komposisi pekerja migran di luar negeri.

"Lebih parah lagi, yang bersangkutan menganggap para

pekerja rumah tangga migran yang bekerja sepanjang hari ini hanya mengharap belas kasih semata, dan bukan bahwa mereka berhak diperlakukan dan mendapatkan hak seperti pekerja," ujarnya.

Menurut Savitri, pernyataan dari Fahri Hamzah itu mencerminkan pandangan yang menganggap pekerjaan rumah tangga tidak lebih mulia daripada pekerjaan 'berketerampilan tinggi'. Padahal, kehadiran pekerja rumah tangga adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dari globalisasi.

"Di Singapura, Hong Kong, bahkan juga di Jakarta, pekerja rumah tangga menjadi sebuah kebutuhan, ketika perempuan

harus bekerja di ruang publik, sementara tanggung jawab domestik tetap menjadi tanggung jawab perempuan," katanya.

Dengan tekanan ekonomi yang luar biasa, perempuan bekerja adalah kebutuhan dan bukan sekedar ekspresi aktualisasi diri.

Savitri menegaskan, sampai saat ini pekerja rumah tangga migran Indonesia sangat rentan dieksploitasi. Oleh karena itu, sudah saatnya negara melakukan tindakan untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri yang sudah menyumbang remitansi senilai lebih dari Rp 62 triliun pada 2016.

"Ketimbang mengeluarkan pernyataan tidak produktif, sudah saatnya DPR sebagai pengambil kebijakan harusnya menjadi motor yang mendorong adanya percepatan revisi UU PPTKILN yang sudah dibahas sejak tahun 2010 namun tidak kunjung disahkan," sebutnya.

DPR juga harus mendorong pemerintah untuk mengesahkan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

Seknas JBM juga menuntut dihentikannya paradigma komodifikasi pekerja migran dan diskriminasi pekerja migran seperti yang tercermin dalam Roadmap Zero Domestic Workers 2017.

"Dalam situasi pemiskinan dan perampasan sumber-sumber kehidupan masyarakat, kebijakan ini justru semakin memperkuat ketidakadilan dan penindasan yang berujung pada pemiskinan perempuan," tandasnya.

Sementara itu, Migrant Care telah melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Politikus PKS ini dilaporkan terkait kicauannya di twitter yang menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai babu yang bekerja hingga ke

luar negeri.

Menurut Direktur eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, kicauan Fahri telah merendahkan para TKI khususnya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

"Kita merekomendasikan penggantian saudara Fahri Hamzah sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR RI," terangnya.

Sebelumnya, cuitan Fahri Hamzah di Twitter soal nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, dianggap melukai para buruh migran atau TKI di luar negeri. Kemudian, dia pun menghapusnya.

"Saya menghapus supaya nggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya (banyak orang). Padahal saya enggak maksud ke arah sana, tapi nggak apa-apa sosmed (sosial media) kan gitu, nggak ada masalah," ujar Fahri. ■ osp